



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 6(2),
79-94

PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA DALAM MEMBENTUK PROFIL PELAJAR PANCASILA

Ida Rosyidatu Sya'adah, Jajang Hendar Hendrawan, Meiwatizal Trihastuti
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan, Cimahi
Idarosyidatusyaadah@gmail.com

Naskah diterima : 7 Juni 2024, Naskah direvisi : 7 Juli 2024, Naskah disetujui : 30 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka merupakan pendekatan inovatif yang menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan holistik dan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dapat membentuk profil pelajar yang berkarakter, patriotik, dan berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan kurikulum merdeka melalui Penguatan Profil Pelajar Pancasila Peserta Didik (2) mengetahui proses penerapan kurikulum merdeka terhadap mata pelajaran Pendidikan pancasila bagi peserta didik dan (3) mengetahui faktor penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka melalui pembelajaran pendidikan pancasila bagi peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini didasari dengan konsep penyelidikan, yang melibatkan penelitian rinci dan berorientasi kasus, atau seri atau kasus individu. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna dari generalisasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penerapan kurikulum merdeka disekolah ini masih dalam proses mengikuti alur sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, dalam prinsip kurikulum merdeka ini sekolah bisa memerdeka pembelajaran, akan tetapi dalam proses belajar ada kendala yang dihadapi oleh guru-guru dalam memahami prinsip merdeka belajar tersebut.

Kata Kunci : Kurikulum Merdeka, PPKn, Profil Pelajar Pancasila.

ABSTRACT

This research discusses the application of Merdeka Curriculum in shaping the Profile of Pancasila Students. The Merdeka Curriculum is an innovative approach that emphasizes holistic character and skill development and the integration of Pancasila values can shape the profile of students who are characterized, patriotic, and competitive. This study aims to (1) find out the implementation of the application of the independent curriculum through Strengthening the Student Profile of Pancasila Learners (2) find out the process of applying the independent curriculum to Pancasila education subjects for students and (3) find out the impact of supporting and inhibiting factors on the application of the independent curriculum through Pancasila education learning for students. The method used in this research is qualitative method, this method is based on the concept of investigation, which involves detailed and case-oriented research, or a series or individual case. The researcher is the key instrument, data collection techniques are triangulated, data analysis is qualitative and research results emphasize the meaning of generalization. The results of this study are The implementation of an independent curriculum at this school is still in the process of following the flow in accordance with the principles of an independent curriculum, in this independent curriculum principle, schools can be independent of learning, but in the learning process there are obstacles faced by teachers in understanding the principles of independent learning.

Keywords: Civic Education, Merdeka curriculum, Pancasila Student Profile.

PENDAHULUAN

Perjalanan dunia pendidikan di Indonesia, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan tersebut merupakan salah satu langkah pengembangan antara kurikulum yang ada dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pemerintah telah menerapkan kurang lebih tujuh bentuk kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang terakhir adalah Kurikulum 2013 (Nurwiatin, 2022, hlm. 479). Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun, untuk saat ini Kurikulum Merdeka baru menjadi opsi bagi satuan pendidikan (Nurwiatin, 2022, hlm. 474). Jadi kesimpulannya Kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang wajib diterapkan satuan pendidikan untuk saat ini.

Kurikulum Merdeka mengusung konsep “Merdeka Belajar” yang berbeda dengan kurikulum 2013, menurut Sherly et al., (2020, hlm. 46) berarti memberikan kebebasan ke sekolah, guru dan peserta didik untuk bebas berinovasi, belajar

mandiri dan kreatif, dimana kebebasan ini dimulai dari guru sebagai penggerak. Suasana belajar yang menyenangkan, mengingat banyak keluhan orang tua dan peserta didik terkait pembelajaran yang mengharuskan mencapai nilai ketuntasan minimum, apalagi selama masa pandemi. Jadi dalam Kurikulum Merdeka tidak ada lagi tuntutan tercapainya nilai ketuntasan minimal, tetapi menekankan belajar yang berkualitas demi terwujudnya peserta didik berkualitas, berkarakter profil pelajar Pancasila, memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi tantangan global. Menurut Kurniawan, Kurikulum Merdeka ini sangat berbeda sekali dengan kurikulum 2013 mulai dari RPP, silabus, peran guru, raport, dan lain-lain, sedangkan di kurikulum merdeka ada yang namanya CP, modul ajar, bahkan di kurikulum merdeka ini ada yang nama merdeka belajar seperti peserta didik dibolehkan memilih mata pelajaran yang diminati maka peserta didik diberikan keleluasaan dalam memilih pelajaran, dalam penerapan kurikulum merdeka ini ada yang namanya P5 (Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila). Bahkan peran guru pun berubah dalam kurikulum merdeka ini guru hanya sebagai fasilitator saja untuk peserta didik karena peserta didik dituntun mampu menciptakan, menyelesaikan suatu masalah yang dipelajarinya”.

Sebagai sekolah penggerak maka SMP Babussalam harus memberikan contoh dan mensosialisasikan kurikulum merdeka ini kepada sekolah lain yang masih menggunakan kurikulum 2013, untuk guru penggerak itu sendiri ada lima orang sebagai perwakilan untuk mensosialisasikannya termasuk kepala

sekolah itu sendiri, penerapan kurikulum merdeka ini baru di terapkan di sekolah swasta karena repositasi kepala sekolah tidak bisa di gantikan selama 3 tahun kedepan jadi untuk sekolah negeri baru satu yang menggunakan kurikulum merdeka ini baru SMP negeri 1 Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Membentuk Profil Pelajar Pancasila.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kurikulum Merdeka melalui Profil Pelajar Pancasila peserta didik di SMP Terpadu Babussalam ?
2. Bagaimana proses penerapan kurikulum merdeka terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi peserta didik di SMP Terpadu Babussalam ?
3. Bagaimana faktor penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi peserta didik di SMP Terpadu Babussalam ?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus di sebuah SMP Terpadu Babussalam Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pengertian menurut Creswell tahun 2017 (Fitriyani, 2019, hlm. 50) sebagai berikut:

“Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, dimana peneliti

mengembangkan analisis mendalam suatu kasus, berupa program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu individu atau lebih. Kasus disini dibatasi waktu, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dengan waktu yang telah ditentukan”.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dimana tujuan studi kasus adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang relevan dari “bagaimana” dan “mengapa” mengenai hubungan peristiwa sepanjang waktu, tidak hanya untuk mengobservasi tren waktu itu sendiri. Interupsi dalam satu rangkaian waktu akan menjadi kesempatan untuk mendalilkan hubungan sebab akibat yang potensial, sama halnya urutan kronologis sebaiknya mengandung patokan sebab akibat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakasek Kurikulum, guru mapel PPKn dan siswa SMP. Sebagaimana umum dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini analisis data dimulai dari reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kurikulum Merdeka Melalui Profil Pelajar Pancasila

Kurikulum merdeka menurut Badan Standar Nasional Pendidikan Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran

guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Kemudian dalam pelaksanaan kurikulum ini ada beberapa tahap sesuai dengan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam mengelola kurikulum pendidikan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum agar dapat menciptakan kurikulum sekolah yang efektif dan efisien. Kurikulum diaplikasikan sebagai pedoman pembelajaran bagi anak yang berisikan beberapa dokumen pembelajaran, visi, misi, tujuan dan profil sekolah (Mentari, 2022, hlm. 32). Jadi, Manajemen kurikulum harus berpedoman pada tujuan pendirian sekolah, dan merujuk kepada implementasi pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan peserta didik

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka Di SMP berjalan dengan baik karena sudah ada beberapa guru yang mengikuti pelatihan sekolah penggerak, kemudian dalam pelaksanaan kurikulum ini ada 4 tahapan mulai dari tahap pertama itu mulai dari pendaftaran, seleksi dan tes ketika sudah lulus baru naik ke tahap selanjutnya akan tetapi banyak PR mulai dari pelatihan, kegiatan untuk P5 hingga menjadi narasumber ke sekolah-sekolah lainnya. Untuk tahap selanjutnya sekolah tersebut harus membuat dan menyusun modul P5 sendiri tidak boleh *copy paste* dari kementerian harus betul-betul buatan sendiri.

Kemudian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Pada keputusan menristek dikti no.56 poin 8 tentang: "Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi Kurikulum Merdeka diatur di lampiran II SK ini".

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan beban kerja dan linieritas guru di SMP Babussalam tersebut secara keseluruhan guru sudah terpenuhi, kalau untuk yang bersertifikat baru tiga orang dari dua puluh guru, akan tetapi sekolah tersebut sekolah swasta maka yang lebih di tingkat kesejahteraan gurunya dibanding linieritasnya karena di sekolah tersebut ada beberapa guru yang memegang beberapa pelajaran, kemudian supaya guru nyaman dan bagus dalam mengajarnya, sekolah tersebut berharap guru mengajar sesuai dengan kompetensinya.

Selain pemenuhan beban kerja guru dan penataan linieritas kementerian pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan program sekolah penggerak sebagai salah satu program untuk mendorong penerapan kurikulum merdeka di setiap sekolah. Program ini bertujuan mendukung perkembangan generasi pelajar sepanjang hayat dengan menghasilkan peserta didik Pelajar Pancasila yang memiliki kepribadian unggul. Implementasi adalah suatu aktivitas, aksi dan tindakan adanya mekanisme suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin

dicapai. Sekolah penggerak merupakan sebuah inisiatif untuk mencapai visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Negara yang maju, berdaulat, mandiri dan memiliki kepribadian yang kuat melalui penciptaan Pelajar Pancasila. Program sekolah Penggerak ini difokuskan pada pengembangan hasil belajar peserta didik serta holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) serta karakter. Inisiatif ini dimulai dengan menumbuhkembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah peran kepala sekolah dan guru.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program sekolah penggerak itu banyak sekali salah satu contohnya rencana berbasis data maka sekolah harus menyusun RKT, RKS, RKAS, berbeda dengan kurikulum sebelumnya dalam menyusun rencana itu bisa dikira-kira untuk kurikulum sekarang semuanya berbasis data bahkan ada data refleksinya yang disebut dengan rapor pendidikan, disini dilihat program apa yang kurang dari rapor pendidikan tersebut maka sekolah harus membuat rencana berbasis data dari kekurangan rapor tersebut. Bahkan untuk kurikulum sekarang masalah mengenai anggaran-anggaran sekolah tidak harus datang ke dinas cukup menggunakan *platform* Tanya bos bahkan untuk berbelanja keperluan sekolah sudah ada platformnya yaitu siplah, itu salah satu digitalisasi di kurikulum merdeka untuk melaksanakan program dan kendala bisa diselesaikan melalui plat form tersebut.

Selain program sekolah penggerak dalam kurikulum merdeka ini ada Penguatan Projek Profil Pelajar Pancasila

(P5), Profil Pelajar Pancasila merupakan manifestasi kehendak dan ditanamkan dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar (Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila, 2020, hlm. 26). Lalu menurut Zuchron (2021, hlm. 68) bahwa profil pelajar pancasila ini memiliki enam kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang utuh secara bersamaan. Keenam dimensi tersebut sebagai berikut:

a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,

Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, dan berakhlak mulia memiliki makna pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yangpelajarbyang berakhlak dalam hubungannya dengan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara (Zuchron, 2021, hlm. 66).

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sekolah ini sudah bagus karena sekolahnya berbasis pesantren selain diterapkan

dalam pembelajaran dan kegiatan P5 ada kegiatan keagamaan seperti melaksanakan sholat dhuha bersama dan siangnya sholat dzuhur bersama dan tausiyahnya. Untuk penanaman akhlak mulianya sudah bagus dibanding sekolah yang diluar.

b. Berkebinekaan global,

Bermakna pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa (Zuchron, 2021, hlm. 66). Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebhinekaan.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berkebinekaan global ini cukup bagus karena peserta didik diajarkan bagaimana bertoleransi menghormati antar suku, ras, etnis, akan tetapi untuk menghormati antar agama mereka belum bisa menerima karena peserta didik berada di lingkungan pesantren maka peserta didik harus dilatih dari dasar lagi untuk dimensi berkebinekaan global ini. Untuk kegiatan P5 dimensi berkebinekaan global ini sudah diterapkan salah satu contohnya yaitu kegiatan mengenai bullying.

c. Bergotong-royong,

Bergotong royong bermakna pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan

kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan, elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi (Zuchron, 2021, hlm. 66). Jadi, gotong royong kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama yang dilakukan dengan sukarela dan memudahkan sehingga segala pekerjaan apapun berjalan dengan lancar, ringan dan cepat selesai.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa gotong royong disini sudah terbiasa dengan banyak kegiatan-kegiatan karena disini berbasis pesantren sistemnya bersama-sama salah satu contohnya dalam menyajikan makanan disini tidak memakai juru masak akan tetapi dibagi-bagi tugasnya untuk santriwati bagian memasak lauk-pauknya sedangkan untuk santriwan itu bagian memasak nasinya, maka untuk dimensi gotong royong itu sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari peserta didik.

b. Mandiri

Pelajar mandiri menurut Andiarti (2022, hlm. 13) menentukan pada prakarya dan tanggung jawab atas pembelajaran dan pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan potensi, minat situasi dan tuntutan perkembangan. Pelajar yang mandiri mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya agar tetap efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan diri dan prestasinya, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi mandiri di sekolah ini sangat

bagus karena peserta didik jauh dari orang tua bahkan sebelum ada dalam kegiatan P5 di sekolah ini peserta didik sudah dilatih dalam kemandiriannya salah satu contohnya di pesantren menyediakan laundry kemudian wali santri menyuruh ditiadakan. Peserta didik dilatih satu sampai dua bulan untuk mencuci pakaian sendiri lalu dibantu kakak-kakak kelasnya. Maka penerapan dimensi mandiri di sekolah ini sudah menonjol bagus.

c. Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar yang berilmu, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan dan memperkuat pengetahuan dan kemampuannya di berbagai disiplin ilmu. Ia mengembangkan kebiasaan mencari tahu dan menyelidiki secara etis untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya tersebut (Anggraena, dkk, 2020, hlm. 65). Selanjutnya, ia menggunakan ilmu tersebut untuk menguatkan kemampuan bernalar kritis. Pada akhirnya, ia akan menjadi sosok yang menghargai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi bernalar kritis di sekolah ini cukup bagus karena dalam kegiatan P5 peserta didik dilatih untuk mengembangkan bernalar kritis salah satu contohnya dalam pengolahan sampah peserta didik dituntut agar dapat mengolah sampah sendiri. Dengan cara menumpuk sampah dan menghasilkan barang yang berguna, akan tetapi dalam pembelajaran masih sulit untuk bernalar kritis peserta didik harus diajarkan kembali dari dasar mengenai bernalar kritis.

d. Kreatif

Pelajar Indonesia yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ia menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan berbagai persoalan, ia juga selalu berupaya untuk mewujudkan gagasan atau idenya menjadi suatu tindakan atau karya nyata dan cenderung berani mengambil resiko dalam berkreasi (Andriarti, 2022, hlm. 15). Jadi, pelajar Indonesia yang kreatif memiliki sensitivitas tinggi dalam menghadapi suatu persoalan yang membuatnya mampu mengidentifikasi dan mencari solusi alternatif serta bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi kreatif di sekolah ini kurang bagus dalam pembelajaran hanya ada di beberapa pelajaran saja salah satu contoh pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, lalu untuk di kegiatan P5 cukup bagus karena antusias peserta didik dalam kegiatan mengolah sampah dengan mengusung tema sampahku kreatifitasku maka antusias peserta didik mengolah sampah sehingga menjadi barang yang berharga.

Dimensi-dimensi tersebut mewujudkan bahwa profil pelajar pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Keenam dimensi profil pelajar

pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila. Guru bertugas mengembangkan keenam dimensi tersebut secara menyeluruh pada seluruh kesatuan pendidikan. Selain itu, untuk membantu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dimensi-dimensi profil pelajar pancasila, maka setiap dimensi dijelaskan dan diuraikan perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja usia sekolah.

2. Proses Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bagi Peserta Didik

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Menristekdikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyem-purna kurikulum sebelumnya. Pada keputusan menristek dikti no. 56 poin 1 tentang: "Satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik"

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkembangan dengan prinsip sesuai dengan kurikulum merdeka disekolah ini masih proses mengikuti alur sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, dalam prinsip kurikulum merdeka ini sekolah bisa memerdeka pembelajaran, akan tetapi dalam prinsip merdeka belajar ini ada kendala bagi guru-guru dalam memahami prinsip merdeka belajar tersebut, maka

sekolah mengadakan kegiatan open class dengan mendatangkan guru model untuk mengajar di kelas lalu ditonton oleh guru lain dengan menerapkan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi, pada pembelajaran diferensiasi ini dibagi menjadi 3 diferensiasi yaitu pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses dan terakhir diferensiasi produk yang dimana peserta didik itu dikelompokkan untuk mencapai seluruh kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi dan bisa mencapai target kemampuannya, maka praktik pembelajaran diferensiasi ini guru sudah bisa menerapkannya pada setiap kelasnya.

Sebagai sekolah penggerak dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara komite pembelajaran, dalam Pelatihan ini sudah ditetapkan hal-hal terkait dengan tujuan, capaian pelatihan, penyelenggara pelatihan, sasaran peserta kegiatan pelatihan, mekanisme pengusulan peserta dan pelaksanaan pelatihan, struktur program, deskripsi materi, alur pelatihan komite pembelajaran, peran, tugas dan tanggung jawab serta standar pengelolaan kelas penyelenggaraan. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu memahami program sekolah penggerak yaitu salah satunya penerapan kurikulum merdeka, serta implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing (Febriani, dkk, 2022, hlm.1662). Adapun capaian dalam pelatihan komite pembelajaran, peserta diharapkan dapat memahami, menganalisis, dan Menyusun kerangka operasional di satuan Pendidikan antara lain: visi, misi, tujuan, tujuan satuan pendidikan, menurunkan Capaian

Pembelajaran (CP) menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), menyusun perangkat ajar (modul ajar, dan perangkat lainnya), serta pengorganisasian pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelatihan penerapan kurikulum merdeka ini sudah terlaksana karena sekolah SMP Terpadu Babussalam ini sebagai sekolah penggerak dan sudah mengikuti tahap-tahap seleksi mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara dan seleksi peer teaching (kepala sekolah yang menjadi modelnya untuk sekolah penggerak) setelah dinyatakan lulus dari tatap-tahap tersebut. Maka sekolah tersebut dilatih selama dua bulan dalam pelatihan tersebut tidak semua guru mengikuti pelatihan tersebut hanya empat guru dan satu kepala sekolah sebagai perwakilan saja yang disebut dengan tim PKP. Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan secara daring baik melalui *zoom* atau *google meet*, setelah dua bulan melaksanakan pelatihan tersebut kepala sekolah dan empat guru tersebut harus mengikuti pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM dalam PMM ini guru harus merangkum dan merefleksikannya lalu disampaikan ke guru-guru lain.

Dalam penelitian ini peneliti tidak berfokus pada penerapan kurikulumnya saja, peneliti mengobservasi dari pembelajaran PPKnya sejauh mana komponen pembelajaran PPKn ini diterapkan di sekolah ini. Pembelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan ini ada komponen pembelajaran yang juga memberikan pengaruh dalam pengembangan *civic*

disposition peserta didik, yaitu materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran.

a. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002, hlm. 50) sehingga materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung. Materi pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip maupun prosedur. Materi pembelajaran hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak kewarganegaraan, pemahaman dan penghayatan nilai serta pengamalan Pancasila dan UUD 19 sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa, pembinaan peserta didik untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi pembelajaran PPKn di sekolah ini belum sesuai karena materi di kurikulum ini perlu penyesuaian karena materinya terlalu jauh untuk usia SMP dibanding dengan materi di kurikulum sebelumnya salah satu contohnya mengenai materi amandemen UUD itu harusnya ada di kelas 10 SMA ini di kelas 7 aja sudah dikasih materi amandemen bahkan peserta didik mengeluh karena mereka tidak paham mengenai materi tersebut.

b. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan dalam

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Untuk itu, keberhasilan pembelajaran PPKn tidak hanya bergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan kompetensi dan materi pembelajaran saja, akan tetapi harus didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran PPKn akan sangat membantu guru dan peserta didik dalam mencapai keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan.

Strategi dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan field psychology, yaitu strategi pembelajaran kontinum atau pembelajaran yang mengkombinasikan antara sudut ekstrim inkuiri dan sudut ekstrim ekspositori yang oleh Wetton dan Malan (1987) dikenal pula dengan sebutan *mixed instruction* (Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 343). Pemilihan strategi dan metode dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dirasakan sangat penting. Pendidikan Kewarganegaraan yang kental dengan value based education harus selektif dalam memilih strategi dan metode agar terdapat nilai-nilai yang bisa diambil dan diaplikasikan oleh peserta didik sebagai dampak pengiring.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan disekolah ini kurang bagus karena saat guru menggunakan metode *student center* peserta didik tidak memahaminya karena tidak ada pemaparan dalam pelajaran

PPKn ini bahkan jika peserta didik disuruh berdiskusi maka diskusi itu tidak akan berjalan dengan baik.

c. Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah dan Zain, 2002, hlm. 139). Selain hal tersebut, media pembelajaran dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terbentuknya proses belajar pada diri peserta didik. Kehadiran media sangat diperlukan untuk membantu memberikan kejelasan terhadap materi yang dipelajari, agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran PPKn yang dipakai di SMP Terpadu Babussalam ini yaitu buku utama, LKS. Selain itu guru sesekali bisa menggunakan media lain seperti *power point*.

d. Sumber Belajar

Sumber belajar pada hakikatnya ada pada lingkungan peserta didik seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatannya tergantung pada kreativitas guru, waktu yang tersedia, biaya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya (Djamarah dan Zain, 2002, hlm. 139). Jadi bahwa setidaknya ada lima macam sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran PPKn, yaitu meliputi: manusia, buku/kepuustakaan, media massa, lingkungan (lingkungan alam, lingkungan sejarah atau lingkungan masyarakat)

dan media pendidikan. dengan demikian media pembelajaran PKn dapat berupa: pesan, kelompok manusia, bahan bacaan (buku, koran, majalah dll), alat (lembaga-lembaga negara).

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber pembelajaran yang digunakan selain buku utama di sekolah ini hanya buku tambahan yaitu LKS karena sekolahnya berbasis pesantren jadi belum bisa menyediakan secara langsung sumber berbasis digital.

e. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003, hlm. 20). Jadi evaluasi pendidikan kewarganegaraan merupakan momentum atau instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan relearning yang bersifat kontinyu, multidimensional dan terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi Pembelajaran PPKn di sekolah ini dengan melaksanakan latihan-latihan soal di LKS dan latihan dari soal yang guru buat. Selain itu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

3. Faktor Penghambat dalam Penerapan Kurikulum Merdeka Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bagi Peserta Didik

Pada Bagian ini akan dideskripsikan pembahasan temuan mengenai implementasi penerapan kurikulum merdeka melalui penguatan profil pelajar pancasila di SMP Terpadu Babussalam. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai dampak dan faktor hambatan penerapan kurikulum merdeka dan solusi penerapan kurikulum merdeka

a. Hambatan-Hambatan penerapan kurikulum merdeka

Hambatan Menurut Oemar Hamalik (2017, hlm. 46) adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui oleh manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran.

Hambatan belajar diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Cornu membedakan hambatan belajar menjadi empat jenis, yaitu (Euis Setiawati, 2018, hlm. 793)

1. Hambatan Kognitif,
Hambatan kognitif ini terjadi ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam proses belajar.
2. Hambatan genetis dan psikologis,

Hambatan genetik dan psikologis terjadi akibat dari perkembangan pribadi peserta didik.

3. Hambatan Didaktis,
Hambatan didaktis terjadi karena sifat pengajaran guru.
4. Hambatan Epistemologi,
Hambatan epistemologi terjadi karena sifat konsep matematika sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran PPKn ini yaitu dalam penyampaiannya menjadi lebih banyak dan rumit dalam materinya, kemudian dari segi isi materinya keberatan karena dalam materi tersebut seharusnya masih dasar yang sesuai dengan usia SMP. Selain dari pembelajaran hambatan tersebut ada pada peserta didik karena dalam mindset peserta didik hanya ada ilmu kepesantrenan yang diunggulkan.

Faktor penghambat dari penerapan kurikulum merdeka yaitu Berdasarkan hasil wawancara kepada KI dan EM maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan dari pelaksanaan kurikulum ini banyak sekali mulai dari perubahan administrasi yang serba berbasis data, lalu perubahan RPP menjadi Modul ajar, lalu perubahan mindset karena sekolah dituntut untuk lebih bervariasi dalam menggunakan metode pembelajaran seperti adanya diskusi, kegiatan Proyek dan lain-lain, kemudian tantangan lainnya di peserta didiknya karena dalam kurikulum merdeka guru hanya sebagai fasilitator pendidikan bukan sebagai sumber pengetahuan maka disini peserta didik dilantik oleh guru karena peserta didik yang harus bersuara.

Selain dari pelaksanaan kurikulum merdeka hambatan dari kegiatan P5 juga masih ada kendala yaitu Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi mandiri di sekolah ini sangat bagus karena peserta didik jauh dari orang tua bahkan sebelum ada dalam kegiatan P5 disekolah ini peserta didik sudah dilatih dalam kemandiriannya salah satu contohnya di pesantren menyediakan laundry kemudian wali santri menyuruh ditiadakan. Peserta didik dilatih satu sampai dua bulan untuk mencuci pakaian sendiri lalu dibantu kakak-kakak kelasnya. Maka penerapan dimensi mandiri di sekolah ini sudah menonjol bagus.

Dalam penelitian peneliti menganalisis faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan program kurikulum merdeka. Dari penelitian dan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka, seperti batasan kebijakan, kurangnya sumber daya, kurangnya tata kelola, manajemen pelatihan, resistensi kelembagaan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dll. Dampak dari kendala-kendala tersebut terhadap implementasi kurikulum merdeka adalah sangat signifikan. Kurangnya pelatihan dan sumber daya dapat menghambat kemampuan guru untuk mengadopsi pendekatan baru dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, kendala kebijakan dan resistensi kelembagaan dapat menghambat fleksibilitas guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Meskipun tantangan ini nyata, solusi telah diusulkan untuk mengatasi faktor penghambat ini.

b. Solusi Penerapan Kurikulum Merdeka

Pelatihan program guru profesional 'Merdeka Belajar' melalui *Collaborative Learning* bagi guru sekolah menengah melalui MGMP telah dilaksanakan dengan sangat baik terlihat dari hasil evaluasi peserta didik menunjukkan Tujuh lima Persen peserta dapat menjawab dengan benar, walaupun perlu ada penguatan terkait materi sharing task. Selain itu dari angket kepuasan terlihat bahwa peserta sangat puas dari kegiatan pelatihan tersebut, dengan rata-rata skor 4,6. Selain itu, dari hasil pendampingan di *google classroom* juga menunjukkan bahwa guru antusias mengikuti pendampingan pendesainan perangkat pembelajaran berbasis merdeka belajar (Indra, dkk, 2023, hlm. 39).

Sebuah instansi pemerintah telah membuat kebijakan tentang pendidikan sebagai respon terhadap masalah pendidikan. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk bertindak dan dapat memunculkan ide dan solusi baru untuk membantu pendidikan mencapai visi dan misinya. Meskipun tampaknya hasil yang memuaskan belum tercapai, namun pergeseran kebijakan di bidang pendidikan secara berturut-turut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan era globalisasi. Solusi yang dapat diusulkan untuk masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan itu sendiri diantaranya: (1) Pilih pelopor yang tegas, sah, cakap dan peduli pada negaranya; (2) Pekerjaan otoritas publik harus memiliki pilihan untuk membuat

sistem persekolahan berjalan efektif, tidak laten dan sungguh-sungguh; (3) Memberikan dukungan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah; (4) Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik; dan (5) Pembinaan pendidikan karakter bagi peserta didik (Tintingon, dkk, 2023, hlm. 807).

Partisipasi merupakan sebuah respon dalam penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Keikutsertaan antara warga sekolah dan masyarakat didorong untuk mampu terlibat secara langsung dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan pendidikan, dapat dilakukan dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dengan harapan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa apabila seseorang berpartisipasi/dilibatkan dalam aspek penyelenggaraan pendidikan maka dapat timbul harapan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan (Machali & Hidayat, 2018, hlm. 60).

Kurikulum merdeka belajar memiliki efek positif dan negatif, dampak positifnya adalah tidak adanya tekanan pada siswa dan guru untuk mencapai nilai kelulusan sesuai konten yang telah ditetapkan, sedangkan dampak negatifnya membuat siswa enggan untuk berkompetisi. Penerapan kurikulum merdeka memang tidak semudah membalikan telapak tangan banyak sekali hambatan-hambatan yang dilalui terutama menanamkan minat dari anggota sekolah untuk mau bergerak maju menuju perubahan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus mampu menggerakkan, mengarahkan, serta menginspirasi guru untuk mau berubah

menuju kearah pendidikan lebih baik. Selain itu perlu kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, dinas, orang tua dan pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan kurikulum merdeka dapat terealisasi optimal (Qurniawati, 2023, hlm. 201).

Beberapa solusi termasuk peningkatan pelatihan guru, kemampuan perubahan kebijakan, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan pendekatan partisipatif untuk pengembangan dan implementasi kurikulum ini. Namun, penting untuk disadari bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan semua masalah. Diperlukan pendekatan holistik dan terpadu untuk mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat guru dalam melaksanakan program kurikulum merdeka adalah tantangan nyata yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini dan penerapan strategi yang tepat, seperti pelatihan yang memadai dan perubahan kebijakan yang mendukung, perbaikan dalam implementasi dapat diharapkan Kurikulum mandiri. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil dan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penerapan kurikulum merdeka disekolah ini masih dalam proses mengikuti alur sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, dalam prinsip kurikulum merdeka ini sekolah bisa memerdekakan pembelajaran, akan tetapi dalam proses

belajar ada kendala yang dihadapi oleh guru-guru dalam memahami prinsip merdeka belajar tersebut. Proses penerapan Kurikulum Merdeka pada Mata pelajaran PPKn pada komponen pembelajaran PPKn di sekolah ini cukup bagus dan menyesuaikan dengan kurikulum, mulai dari materi yang diterapkan kepada peserta didik (masih menyesuaikan), metodenya menggunakan student center, media yang digunakan yaitu infocus dan power point, sumber belajar yaitu buku utama dan tambahan yaitu LKS dan evaluasi pembelajarannya berupa latihan soal baik yang di buku maupun yang disediakan oleh guru. Proses penerapan Kurikulum Merdeka pada Mata pelajaran PPKn pada komponen pembelajaran PPKn di sekolah ini cukup bagus dan menyesuaikan dengan kurikulum, mulai dari materi yang diterapkan kepada peserta didik (masih menyesuaikan), metodenya menggunakan student center, media yang digunakan yaitu infocus dan power point, sumber belajar yaitu buku utama dan tambahan yaitu LKS dan evaluasi pembelajarannya berupa latihan soal baik yang di buku maupun yang disediakan oleh guru. Solusi telah diusulkan untuk mengatasi faktor penghambat ini diantaranya adalah peningkatan pelatihan guru, kemampuan perubahan kebijakan, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan pendekatan partisipatif untuk pengembangan dan implementasi kurikulum ini. Namun, penting untuk disadari bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan semua masalah. Diperlukan pendekatan holistik dan terpadu untuk mengatasi kendala tersebut.

REFERENSI

- Andiarti, A. (2022). *Profil pelajar pancasila pembekalan kampus mengajar*. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
- Anggraena, Dkk. (2020). *Kajian pengembangan profil pelajar pancasila*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Zain, A., & Djarmarah, S. B. (2010). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Euis, S. (2011). Hambatan epistemologi (epistemological obstacles) dalam persamaan kuadrat pada siswa madrasah aliyah. In *Proceedings International Seminar and the Fourth National Conference on Mathematics Education*. Yogyakarta: Yogyakarta State University.
- Febriani, Y. (2022). Implementasi profil pelajar pancasila sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter pada siswa smp. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*.1.287-293
- FITRI, Y. (2021). Implementasi budaya belajar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di mts darul ulum panaragan jaya di kabupaten tulang bawang barat (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Hamalik, Oemar. (2017) *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya,
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil pelajar pancasila sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224-1238.
- Kahfi, A. (2022). Implementasi profil pelajar Pancasila dan Implikasinya terhadap karakter siswa di sekolah. *DIRASAH: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 138-151.
- Kemendikbud. (2003). *Sistem pendidikan nasional (undang-undang RI no.20 tahun 2003)*. Jakarta: Fokus Media.
- Machali, I. (2019). *the Handbook of Education Management* Ed 2.
- Mulyana, A., Darmawan, W. & Fauzi, W.i. (2024). *Bercengkrama dengan tokoh sejarah: kisah-kisah singkat inspiratif keteladanan tokoh bangsa*. Bandung: CV Jendela Hasanah.
- Putri, R. I. I., Zulkardi, Z., Inderawati, R., Kurniadi, E., Lisnani, L., Rawani, D., ... & Septimiranti, D. (2023). Pelatihan guru profesional” merdeka belajar” melalui collaborative learning bagi guru sekolah menengah di kota pagaralam. *Jurnal Terapan Abdimas*, 8(1), 33-40.
- Rahma, A., Khairiah, D., Mentari, E. G., Rahman, M. H., Muttaqin, M. A., Rahayu, M., ... & Wati, Y. E. R. (2021). *Manajemen pengembangan pendidikan anak usia dini*.
- Nurwiatin, N. (2022). Pengaruh pengembangan kurikulum merdeka belajar dan kesiapan kepala sekolah terhadap penyesuaian pembelajaran di sekolah. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(2), 472-487.
- Qurniawati, R. (2023). Peran kurikulum merdeka dalam meningkatkan harmonisasi antara sekolah dan masyarakat di era digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(2),
- Sherly, S., Herman, H., Halim, F., Dharma, E., Purba, R., Sinaga, Y. K., & Tannuary,

- A. (2021). Sosialisasi implementasi program profil pelajar pancasila di smp swasta sultan agung pematangsiantar. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 1(3), 282-289.
- Tintigon, J. Y., Usuh, E. J., & Sumual, T. E. M. (2023). Pengembangan sumber daya pendidik melalui peningkatan kualitas pendidikan profesi guru prajabatan di indonesia. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 94–103.
- Wahab, Aziz. (2018). *Metode dan model-model mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Zuchron, D. (2021). *Tunas pancasila*. Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Diknas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.